



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD RUM**
2. Jabatan : **PJ. WALIKOTA**
3. NHK : **32474**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 439 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 503 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/78 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **239.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI W175 CAFE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **15.850.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **120.299.692**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.175.149.692
III. HUTANG	Rp.	81.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.093.549.692

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.